



**Pemerintah  
Kota Pasuruan**

# LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2023**

**KECAMATAN GADINGREJO**

**Jalan Jendral A.Yani No.57 Pasuruan**

Website : [gadingrejo.pasruankota.go.id](http://gadingrejo.pasruankota.go.id) Telp : (0343) 424079

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Gadingrejo merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun tiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gadingrejo. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Gadingrejo.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Gadingrejo. Kinerja Kecamatan Gadingrejo diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bahan integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Gadingrejo pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Governance*.

Pasuruan, 21 Februari 2024

  
CAMAT GADINGREJO  
KOTA PASURUAN  
**IMRON ROSADI, SE**  
NIP. 19690417 198903 1 017

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Unsur Kewilayahan

### ***1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***

Pelaksanaan Program *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum* diukur dengan satu indikator yaitu :

1. Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 7 kelurahan dan terealisasi 8 kelurahan sehingga capaiannya sebesar 114,29%. Capaian ini berdasarkan data kelurahan yang telah menggunakan sistem untuk melakukan pelayanan. Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya sistem yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan pada semua kelurahan di Kecamatan Gadingrejo.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum didukung oleh satu Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target sebesar 6 kegiatan dengan realisasi sebesar 6 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh kinerja yang baik dari seksi pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan Gadingrejo dan seksi pemerintahan, ketentraman ketertiban dan pelayanan umum di kelurahan se-wilayah Kecamatan Gadingrejo sehingga kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik setiap bulannya.

### ***2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum***

Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diukur dengan satu indikator yaitu :

1. Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada data pengaduan masyarakat yang diterima sebanyak 26 pengaduan dan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu sebanyak 26 pengaduan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara unsur 3 pilar di Kecamatan, 3 pilar ditingkat kelurahan dan tokoh masyarakat setempat dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh satu kegiatan yakni:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan target sebesar 15 kegiatan dan terealisasi sebesar 12 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 73,33%. Capaian ini berdasarkan pada data kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sejumlah 12 kegiatan dari total 15 kegiatan. Ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan karena adanya beberapa pengurangan kegiatan akibat dari refocusing anggaran, sedangkan belum dilakukan penyesuaian pada target indikator kegiatan terkait.

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diukur dengan *satu* indikator yaitu :

1. Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina pada tahun 2023 ditargetkan sebesar s100% dan terealisasi 70% sehingga capaiannya sebesar sehingga capaiannya sebesar 70%. Capaian ini berdasarkan dari data kelembagaan masyarakat yang dibina sebesar 16 lembaga dari total keseluruhan Lembaga yang berjumlah 28 lembaga. Ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan karena ada beberapa

lembaga yang sudah dibina oleh instansi yang membidangi, sedangkan pada target indikator dicantumkan semua lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Gadingrejo.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung oleh dua Kegiatan yakni:

1. Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan indikator jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina dengan target sebesar 20 lembaga dan terealisasi sebesar 8 lembaga sehingga capaiannya sebesar 40%. Capaian ini berdasarkan jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina tahun 2023 sejumlah 8 kelembagaan masyarakat dari total jumlah kelembagaan masyarakat yang masuk dalam kegiatan Tahun 2023 sejumlah 8 kelembagaan masyarakat yaitu TP. PKK Kecamatan, Pokja Kemiskinan, Karang Taruna Kecamatan, Forum Layak Anak, Forum Kecamatan Sehat, UKS, Posyandu lansia dan Posyandu Balita. Ketidaktercapaian target indikator disebabkan karena ada beberapa lembaga yang sudah dibina oleh instansi yang membidangi, sedangkan pada target indikator dicantumkan semua lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Gadingrejo.
2. Kegiatan pemberdayaan kelurahan diukur dengan indikator jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina dengan target sebesar 8 lembaga dengan realisasi sebesar 8 lembaga sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data lembaga masyarakat tingkat kelurahan yang dibina sejumlah 8 lembaga dari total 8 lembaga. Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya Koordinasi yang baik antara seksi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dengan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

#### **4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diukur dengan *satu* indikator yaitu :

1. Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 72% dan terealisasi 77,78% sehingga capaiannya sebesar 108,02%. Capaian ini berdasarkan data usulan musrenbangcam yang

diakomodir dalam musrenbangkot sebanyak 63 usulan dari total 81 usulan musrenbang. Ketercapaian indikator ini didukung oleh suksesnya pelaksanaan musrenbang di kelurahan sehingga usulan dapat masuk ke musrenbang kecamatan tepat waktu.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung oleh satu kegiatan yakni:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan dengan target sebesar 1 kegiatan dan terealisasi sebesar 1 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan dengan baik yaitu satu kegiatan musrenbang di kecamatan Gadingrejo. Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya Koordinasi yang baik antara seksi pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi .....	2
1.2.2 Anggaran .....	5
1.3 Dasar Hukum .....	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>37</b>
3.1 Capaian Kinerja.....	37
3.1.1 Skala Capaian Kinerja .....	37
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	38
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	41
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	45
3.1.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standard Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.....	48
3.1.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi atas Capaian Kinerja .....	49
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	52
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	53
3.2 Realisasi Anggaran.....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ...	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan	11
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2023.....	13
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Camat Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023 .....	14
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja.....	17
Tabel 3.2 Data Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Gadingrejo.....	19
Tabel 3.3 Data Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Gadingrejo .....	21
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.....	22
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	23
Tabel 3.6 Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan .....	25
Tabel 4.1 Pencapaian Capaian Sasaran Kecamatan Gadingrejo.....	26

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Gadingrejo .....	4
-----	--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, pada akhir pelaksanaan tahun anggaran 2023, Kecamatan Gadingrejo menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Gadingrejo) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Gadingrejo dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

- Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Gadingrejo;
- Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Gadingrejo pada tahun berikutnya.

## **1.2 Penjelasan Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, tugas Kecamatan adalah sebagai berikut: Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

6. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
8. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
9. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
10. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
11. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi :

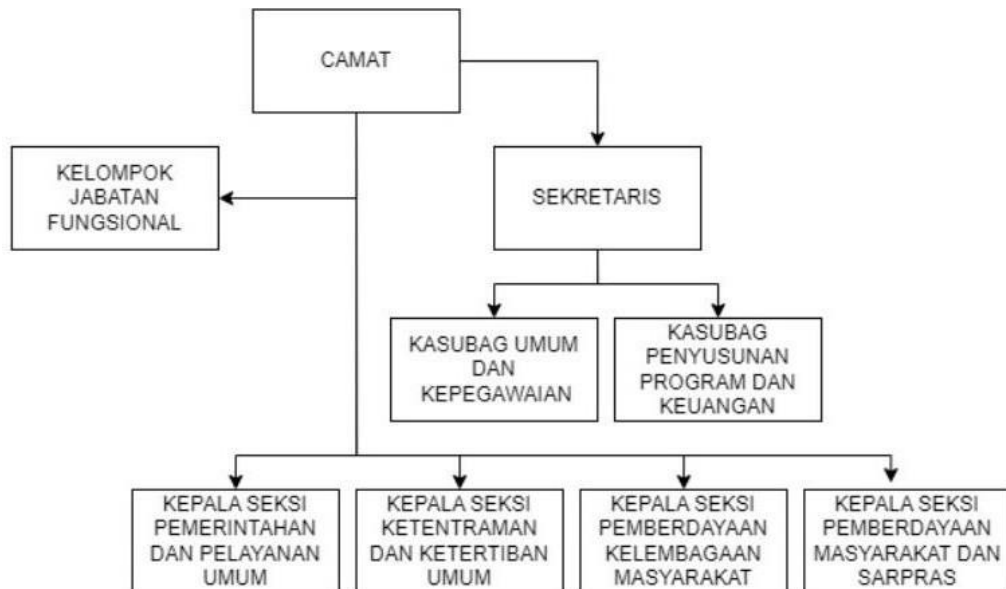
1. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
3. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketrtiban umum;
5. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
6. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan rakyat;
7. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan. Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan. Berikut merupakan fungsi Kelurahan:

1. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
2. pelaksanaan pelayanan administrasi umum di wilayah Kelurahan;
3. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Kelurahan; dan
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kelurahan.

### 1.2.1 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Wali Kota Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 Susunan Organisasi Kecamatan sebagai berikut:



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Kecamatan Gadingrejo

### 1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Gadingrejo

**Tabel 1.12 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2022) dan Tahun n (2023)**

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp 15.135.773.194
APBD	Tahun n	Rp 15.119.848.289
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp -

### 1.3 Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021.
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
11. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

#### **1.4 Sistematika Laporan Kinerja**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

##### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

###### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan



untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Kecamatan Gadingrejo sebagai perangkat daerah yang membawahi beberapa sub unit yaitu kelurahan merupakan koordinator dari segala program kegiatan yang ada di kelurahan yang juga berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Kecamatan Gadingrejo adalah pada misi IV sehingga Kecamatan Gadingrejo memiliki 2 tujuan sebagaimana berikut:

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut di atas maka akan kami tampilkan tabel terperinci terkait tujuan sasaran beserta indikator dan target kinerja Kecamatan Gadingrejo pada tahun 2021-2026, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	81,88	82	82,40	83,50	84,26	85,53
		Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	50	62,5	87,5	100	100	100
			Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	75	87,5	100	100	100	100
		Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100	100	100	100	100	100
			Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD	77,5	78	78,5	79	79,5	80
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	B	B	B	B	BB	BB
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Gadingrejo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil Reviu IKU. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sebanyak 4 Indikator. Berikut adalah tabel IKU Kecamatan Gadingrejo tahun 2023:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Metode/Formulasi Perhitungan	Metode/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kecamatan	Sesuai Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017	Sesuai Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017	
2		Meningkatnya pelayanan masyarakat	Persentase Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi / Jumlah total kelurahan x 100%	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi / Jumlah total kelurahan x 100%	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

3			Prosentase Laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	Jumlah laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart / Jumlah total laporan trantibmas x 100%	Jumlah laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart / Jumlah total laporan trantibmas x 100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	Jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang / Jumlah total kelurahan x 100%	Jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang / Jumlah total kelurahan x 100%	
5		Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	Jumlah lembaga yang aktif / Jumlah total lembaga x 100%	Jumlah lembaga yang aktif / Jumlah total lembaga x 100%	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
6			Persentase usulan musrenbangcam yang di sepakati dalam forum PD	Jumlah usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD / Jumlah total usulan musrenbangcam x 100%	Jumlah usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD / Jumlah total usulan musrenbangcam x 100%	Seksi Pemberdayaan masyarakat sarana dan prasarana

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	Persen	82,40
		Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Prosentase kelurahan yangtelah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Persen	87,50
			Prosentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	Persen	100
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Persentase kelurahan dengankategori cepat berkembang	Persen	100
		Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	Persen	100
			Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam ForumPD	Persen	78,50
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	BB
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	100
			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	Persen	100

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tahun 2023

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Utama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Perubahannya serta hasil reviu. Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Camat Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kecamatan	82.4%
2	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan Terintegrasi	100%
		Persentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	100%
4	Meningkatnya keberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100%
		Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam Forum PD	78.5%
5		Nilai SAKIP SKPD	BB

	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Temuan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Gadingrejo Tahun 2023

No.	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	11.112.532.617
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	39.576.380
3.	Program koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	251.721.600
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	191.946.340
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	51.910.800
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp.</b>	<b>11.647.687.737</b>

Dapat dijelaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan DPA Perangkat Daerah yang dituangkan pada table dibawah ini:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2023**

Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</b>	<b>100</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	<i>100</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	<i>100</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1



	Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12
<b><i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</i></b>	<b>100</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3
<b><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya</i></b>	<b>100</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1
<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</i></b>	<b>100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1
<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b><i>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</i></b>	<b>100</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19
<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i></b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Krapyakrejo)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bukir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sebani)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gentong)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gadingrejo)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Randusari)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Karangketug)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Petahunan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15
<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</i></b>	<b><i>100</i></b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	43
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot</b>	<b>72</b>
<b><i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i></b>	<b><i>Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan</i></b>	<b><i>1</i></b>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina</b>	<b>100</b>
<b><i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i></b>	<b><i>Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina</i></b>	<b><i>20</i></b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7

<b><i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i></b>	<b><i>Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina</i></b>	<b>8</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Krapyakrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bukir)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sebani)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gentong)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gadingrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Randusari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Karangketug)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Petahunan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krapyakrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bukir)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sebani)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gentong)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gadingrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Randusari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangketug)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Petahunan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</b>	<b>100</b>
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	<i>15</i>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Krapyakrejo)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Bukir)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sebani)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gentong)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gadingrejo)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Randusari)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Karangketug)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Petahunan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</b>	<b>7</b>
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)</i>	<b>6</b>
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Krapyakrejo)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Bukir)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Sebani)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gentong)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8

Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Randusari)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Karangketug)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Petahunan)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023*

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.722.108.577</b>
<b><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	<b>17.623.400</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.052.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	909.820
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.661.080
<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	<b>10.140.002.400</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.918.596.120
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	982.240
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.092.440
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	219.331.600
<b><i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i></b>	<b>44.049.500</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.049.500
<b><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	<b>925.000</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	925.000
<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<b>50.525.280</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.086.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.576.180
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.760.400
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.702.200
<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b>117.180.702</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.180.702
<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>621.572.735</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.877.585



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.895.150
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Krapyakrejo)	71.503.880
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bukir)	70.389.380
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sebani)	77.048.985
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gentong)	86.297.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gadingrejo)	85.817.320
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Randusari)	80.149.680
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Karangketug)	58.114.560
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Petahunan)	80.255.155
<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>120.653.600</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.160.000
Pemeliharaan Mebel	3.120.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.263.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.110.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>39.576.380</b>
<b><i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i></b>	<b>39.576.380</b>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.576.380
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.515.330.560</b>
<b><i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i></b>	<b>191.946.340</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	191.946.340
<b><i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i></b>	<b>1.323.384.220</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Krapyakrejo)	18.803.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bukir)	21.059.100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sebani)	16.158.520
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gentong)	12.186.160



Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gadingrejo)	16.397.040
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Randusari)	20.365.100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Karangketug)	16.514.680
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Petahunan)	15.336.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krapyakrejo)	144.165.960
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bukir)	153.777.920
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sebani)	136.263.380
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gentong)	131.453.120
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gadingrejo)	151.163.640
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Randusari)	183.722.900
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangketug)	130.442.720
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Petahunan)	155.574.480
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>453.374.320</b>
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<b>453.374.320</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	251.721.600
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Krapyakrejo)	25.014.500
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Bukir)	26.738.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sebani)	19.032.580
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gentong)	20.374.080
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gadingrejo)	20.919.760
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Randusari)	24.407.900
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Karangketug)	19.901.900

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Petahunan)	27.264.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.171.955.120</b>
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<b>1.171.955.120</b>
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	51.910.800
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Krapyakrejo)	155.570.400
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Bukir)	131.391.900
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Sebani)	110.262.960
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gentong)	141.005.580
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gadingrejo)	127.933.780
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Randusari)	125.735.900
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Karangketug)	146.516.600
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Petahunan)	181.627.200

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023

Pada bulan Oktober 2023 terjadi perubahan perjanjian kinerja Tahun 2023

dikarenakan perubahan alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Gadingrejo Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kecamatan	82.4%	82.4%
2	Meningkatnya pelayanan	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	100%	100%

	masyarakat	Persentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	100%	100%
4	Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100%	100%
		Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam Forum PD	78.5%	78.5%
5	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	BB	BB
		Temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%

No.	Program		Target	
			Sebelum	Sesudah
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	11.112.532.617	11.398.121.985
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	39.576.380	39.576.380
3.	Program koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	251.721.600	200.721.600
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	191.946.340	141.002.660
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	51.910.800	65.110.800
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp.</b>	<b>11.647.687.737</b>	<b>11.844.533.425</b>

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**

Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		Sebelum	Sesudah
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

<b>Perangkat Daerah</b>	<b>kinerja yang tersusun tepat waktu</b>		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	87
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	3
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	9
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2	2

	Undangan yang Disediakan		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1
<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100</i></b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	23
<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100</i></b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Krapyakrejo)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bukir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sebani)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gentong)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gadingrejo)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19	19
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Randusari)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Karangketug)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Petahunan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	15
<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100</i></b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	8
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	43	43

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	2
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	7
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan yang dibina</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Krapyakrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	8
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bukir)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	8
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sebani)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	8
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gentong)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	8

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gadingrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20	20
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Randusari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	8
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Karangketug)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	3
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Petahunan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	8
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krapyakrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	8
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bukir)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	7
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sebani)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	2
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gentong)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	2
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gadingrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	2
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Randusari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangketug)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	10
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Petahunan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5



<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Krapyakrejo)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	2
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Bukir)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	2
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sebani)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gentong)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gadingrejo)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Randusari)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	2
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Karangketug)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	2



Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Petahunan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)</i>	<b>6</b>	<b>6</b>
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5	5
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Krapyakrejo)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	3
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Bukir)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	3
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Sebani)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	2
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gentong)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8	8
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gadingrejo)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8	8
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Randusari)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4	4

Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Karangketug)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4	4
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Petahunan)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12	12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
	Sebelum	Sesudah
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.722.108.577</b>	<b>12.046.355.589</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<b>17.623.400</b>	<b>42.623.400</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.052.500	3.052.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	909.820	909.820
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.661.080	38.661.080
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<b>10.140.002.400</b>	<b>10.136.969.986</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.918.596.120	9.967.709.706
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	982.240	982.240
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.092.440	1.092.440
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	219.331.600	167.185.600
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<b>44.049.500</b>	<b>9.949.500</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.049.500	9.949.500
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<b>925.000</b>	<b>925.000</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	925.000	925.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<b>50.525.280</b>	<b>81.743.280</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.086.500	6.086.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.576.180	6.576.180
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.760.400	1.760.400
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000	2.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.702.200	64.920.200
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<b>117.180.702</b>	<b>168.139.902</b>

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.180.702	168.139.902
<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>621.572.735</b>	<b>1.289.218.139</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.877.585	77.089.385
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.895.150	562.095.150
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Krapyakrejo)	71.503.880	82.496.524
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bukir)	70.389.380	70.389.380
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sebani)	77.048.985	77.048.985
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gentong)	86.297.000	93.277.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gadingrejo)	85.817.320	85.817.320
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Randusari)	80.149.680	86.989.680
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Karangketug)	58.114.560	65.014.560
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Petahunan)	80.255.155	87.200.155
<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>120.653.600</b>	<b>316.786.382</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.160.000	62.160.000
Pemeliharaan Mebel	3.120.000	3.120.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.263.600	17.263.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.110.000	234.242.782
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>39.576.380</b>	<b>39.576.380</b>
<b><i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i></b>	<b>39.576.380</b>	<b>39.576.380</b>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.576.380	39.576.380
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.515.330.560</b>	<b>1.464.386.880</b>
<b><i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i></b>	<b>191.946.340</b>	<b>141.002.660</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	191.946.340	141.002.660
<b><i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i></b>	<b>1.323.384.220</b>	<b>1.323.384.220</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Krapyakrejo)	18.803.000	18.803.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bukir)	21.059.100	21.059.100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sebani)	16.158.520	16.158.520
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gentong)	12.186.160	12.186.160
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gadingrejo)	16.397.040	16.397.040
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Randusari)	20.365.100	20.365.100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Karangketug)	16.514.680	16.514.680
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Petahunan)	15.336.500	15.336.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krapyakrejo)	144.165.960	144.165.960
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bukir)	153.777.920	153.777.920
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sebani)	136.263.380	136.263.380
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gentong)	131.453.120	131.453.120
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gadingrejo)	151.163.640	151.163.640
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Randusari)	183.722.900	183.722.900
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangketug)	130.442.720	130.442.720
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Petahunan)	155.574.480	155.574.480
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>453.374.320</b>	<b>384.374.320</b>
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<b>453.374.320</b>	<b>384.374.320</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	251.721.600	200.721.600
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Krapyakrejo)	25.014.500	25.014.500
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Bukir)	26.738.000	26.738.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Sebani)	19.032.580	19.032.580
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.374.080	20.374.080

(Gentong)		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gadingrejo)	20.919.760	20.919.760
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Randusari)	24.407.900	24.407.900
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Karangketug)	19.901.900	19.901.900
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Petahunan)	27.264.000	27.264.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.171.955.120</b>	<b>1.185.155.120</b>
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<b>1.171.955.120</b>	<b>1.185.155.120</b>
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	51.910.800	65.110.800
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Krapyakrejo)	155.570.400	155.570.400
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Bukir)	131.391.900	131.391.900
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Sebani)	110.262.960	110.262.960
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gentong)	141.005.580	141.005.580
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Gadingrejo)	127.933.780	127.933.780
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Randusari)	125.735.900	125.735.900
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Karangketug)	146.516.600	146.516.600

Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Petahunan)	181.627.200	181.627.200
--	-------------	-------------

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja

##### 3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
Kategori Capaian Kinerja

No	Rata-rata % Capaian	Kategori
1.	90 - 100	Sangat Tinggi
2.	80 - 89	Tinggi
3.	70 - 79	Sedang
4.	60 - 69	Rendah
5.	50 - 59	Sangat Rendah

### 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Uraian perbandingan realisasi capaian kinerja Kecamatan Gadingrejo tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sampai dengan realisasi tahun berjalan yaitu tahun 2023 dapat dilihat di tabel berikut ini:

**Tabel 3.2 Data Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Gadingrejo**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	82,40%	83,50%	101,33%	Sangat Tinggi	Seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum
2	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan Terintegrasi	87.5%	100%	114,29%	Sangat Tinggi	Seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum
		Presentase kegiatan dan laporan trantibmasyang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	100%	87.50%	87.50%	Sangat Tinggi	Seksi Pemerintahan dan pelayanan Umu



4	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100%	70%	70%	Tinggi	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
		Persentase usulan musrenbangcam yang disampaikan dalam forum PD	78.50%	77.78%	99.08%	Sangat Tinggi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sarana dan Prasarana
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP SKPD	BB	-	-	-	
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Sekretaris Camat
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Pada tabel 3.2 diatas, menyajikan data capaian realisasi indikator kinerja utama pada 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator, sebagaimana berikut:

Sasaran ke-1:

Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan indikator berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan terealisasi 83.50% dengan target 82,40 dan capaian sebesar 101,33%. Hal ini diperoleh dari survey yang dilakukan kepada masyarakat atas pelayanan Kecamatan dengan jumlah responden sebanyak 200 orang di seluruh wilayah Kecamatan Gadingrejo. Terdapat 9 nilai unsur pelayanan yang menjadi dasar penilaian atas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gadingrejo dengan periode survey tanggal 13 Oktober 2023 s.d 14 Desember 2023.

Sasaran ke-2:

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat, dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi terealisasi 100% dengan target 87,50% dan capaian sebesar 114,29%, hal ini karena didukung oleh adanya sistem yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan pada semua kelurahan di wilayah Kecamatan Gadingrejo.
2. Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart dengan target, realisasi dan capaian sebesar 100%, capaian ini dihasilkan dari jumlah laporan pada tahun 2023 sebanyak 26 kejadian dan telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Sasaran ke-3:

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator yaitu:

1. Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang terealisasi 87,5% dengan target 100% dan capaian sebesar 87,50%. Hal ini dikarenakan dari kelurahan yang berjumlah 8 dan yang memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori cepat berkembang hanya 7 kelurahan.

Sasaran ke-4:

Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan, dengan 2 (dua)

indikator yaitu:

1. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif terealisasi 70% dengan target 100% dan capaian sebesar 70%. Capaian ini dihasilkan dari jumlah lembaga yang dibina oleh Kecamatan Gadingrejo seluruhnya aktif dan mengikuti kegiatan yang ada di Masyarakat.
2. Persentase usulan musrenbangcam yang disampaikan dalam forum PD dengan capaian 77.78%, capaian ini dihasilkan dari 63 usulan yang disampaikan dalam forum PD dari total 81 usulan.

Sasaran ke-5:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Nilai SAKIP SKPD belum ada dikarenakan nilai SAKIP keluar di tahun selanjutnya.
2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti dengan capaian 100% dan telah memenuhi target pada tahun 2023
3. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD dengan capaian 100% dan telah memenuhi target pada tahun 2023

### 3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	82,10%	83,38%	82,40%	83,50%	101,33%
2	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	0	100%	100%	100%	100%

		Presentase kegiatan dan laporan tranbibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	62,50%	62,50%	100%	87.50%	87.50%
4	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	70%	70%
		Persentase usulan musrenbangcam yang disampaikan dalam forum PD	69,39%	52,04%	78.50%	77.78%	99.08%
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP SKPD	BB	BB	BB	-	-
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Pada tabel 3.3 diatas menyajikan data perbandingan capaian kinerja pada tahun pelaporan dan beberapa tahun sebelumnya dan dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Sasaran ke-1:

Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dengan indikator berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan mengalami kenaikan disetiap tahunnya dengan nilai perolehan pada tahun 2021 sebesar 82,10 , tahun 2022 sebesar 83,38 dan tahun 2023 sebesar 83,50.

Sasaran ke-2:

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat, dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi di tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% dihitung sejak dibangunnya aplikasi SIMAK pada tahun 2022, hal ini karena didukung oleh adanya sistem yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan pada semua kelurahan di Kecamatan Gadingrejo
2. Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart dari tahun ke tahun selalu mencapai 100%. Capaian ini diperoleh karena setiap adanya pengaduan selalu ditangani langsung dengan bantuan dari pihak instansi vertikal.

Sasaran ke-3:

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator yaitu:

1. Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 87,50% setelah 2 tahun berturut-turut hanya mencapai 62,50% saja. Kenaikan ini diperoleh dari kelurahan yang berjumlah 8 dan yang memenuhi kategori cepat berkembang meliputi 7 kelurahan dari jumlah sebelumnya yang hanya 5 kelurahan.

Sasaran ke-4:

Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan, dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif dengan capaian 70%. Capaian ini berdasarkan dari data kelembagaan masyarakat yang dibina sebesar 16 lembaga dari total keseluruhan Lembaga yang berjumlah 28 lembaga. Ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan karena ada beberapa lembaga yang sudah dibina oleh instansi yang membidangi, sedangkan pada target indikator dicantumkan semua lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Gadingrejo
2. Persentase usulan musrenbangcam yang disampaikan dalam forum PD pada tahun 2021 mencapai 69,39% dan sempat mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 52,04% hal ini dikarenakan usulan yang ditolak bukan prioritas maupun tidak sesuai OPD pengampunya. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 77.78%, capaian ini dihasilkan dari 63 usulan yang disampaikan dalam forum PD dari total 81 usulan

Sasaran ke-5:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Nilai SAKIP SKPD pada tahun 2021 dan 2022 memperoleh predikat B dengan nilai 61.90 di tahun 2021 serta nilai 67.06 di tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2023 nilai SAKIP di keluarkan pada tahun selanjutnya.
2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti setiap tahun telah mencapai 100%.
3. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD telah mencapai 100% setiap tahunnya.

**3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
1.	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	83.50%	85.53%	97.62%
2.	Meningkatnya pelayanan masyarakat	2. Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	100.00%	100.00%	100.00%
		3. Prosentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100.00%	100.00%	100.00%
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1. Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	87.50%	100.00%	87.50%
4.	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan	1. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	70.00%	100.00%	100.00%
		2. Persentase usulan musrenbangcam yang disampaikan dalam forum PD	77.78%	80.00%	97.22%

5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP SKPD	-	BB	-
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat memiliki indikator sebagai berikut:
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kecamatan yang ditargetkan sampai dengan akhir periode adalah 85.53% dan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 83.50%. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin dekat progress capaian kinerja dengan target akhir periode yakni 85,53%.
2. Meningkatnya pelayanan masyarakat memiliki indikator sebagai berikut:
  - a. Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi yang ditargetkan sampai dengan akhir periode adalah 100%, dan pada tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar 100%. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa target telah terpenuhi di pertengahan periode.
  - b. Prosentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standard ditargetkan sampai dengan akhir periode adalah 100% dan pada saat tahun 2023 telah terealisasi 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat memiliki indikator sebagai berikut:
  - a. Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang yang ditargetkan sampai dengan akhir periode adalah 100% dan pada tahun 2023 tercapai sebesar



87.5%. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin dekat dengan progress capaian kinerja pada target akhir periode yakni 100%.

4. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan memiliki indikator sebagai berikut:
  - a. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif yang ditargetkan sampai dengan akhir periode adalah 100% dan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 70%. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin dekat progres capaian kinerja pada target akhir periode yakni 100%.
  - b. Persentase usulan musrenbangcam yang disampaikan dalam forum PD yang ditargetkan sampai dengan akhir periode adalah 80% dan pada tahun 2023 tercapai 77.78%. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin dekat progres capaian kinerja pada target akhir periode yakni 80%.
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah memiliki indikator sebagai berikut:
  - a. Nilai SAKIP SPKD pada tahun 2023 belum ada dikarenakan SAKIP tahun (n) keluar pada tahun (n+1).
  - b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti telah mencapai target yakni 100%
  - c. Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD telah mencapai target yakni 100%

**3.1.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standard Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota**

<b>No</b>	<b>Tujuan/ Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Tahun n</b>	<b>Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain</b>	<b>% Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
		<b>NIHIL</b>			

### 3.1.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi atas Capaian Kinerja

Analisis terhadap keberhasilan, kegagalan dan solusi yang dilakukan atas pencapaian kinerja Kecamatan Gadingrejo

Tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	82,40%	83,50%	101,33%	Peningkatan kualitas pelayanan sehingga mewujudkan kepuasan Masyarakat	Mempertahankan kualitas pelayanan yang baik
2.	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	87.5%	100%	100%	Adanya sistem yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan pada semua kelurahan di Kecamatan Gadingrejo	Memfaatkan fasilitas yang disediakan dengan sebaik-baiknya
		Presentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%	100%	Koordinasi yang baik antara trantibmas dengan lembaga terkait sehingga cepat dalam penanganan pengaduan	Mempertahankan kualitas pelayanan yang baik -

3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	100%	87.50%	87.50%	Adanya ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi dan dicukupi untuk mencapai kategori cepat berkembang dan beberapa kelurahan tidak memenuhi syarat.	Melakukan pembinaan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh nilai yang mencukupi sesuai kriteria cepat berkembang
	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100%	70%	100%	Ada beberapa lembaga yang sudah dibina oleh instansi yang membidangi, sedangkan pada target indikator dicantumkan semua lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Gadingrejo	Memperbaiki target pada indikator agar realisasi yang didapat sesuai

4.	masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan musrenbangcam yang disampaikan dalam forum PD	78.50%	77.78%	99.08%	Belum optimalnya usulan yang dapat dipenuhi dalam musrenbang yang menjadi prioritas dari OPD pengampunya.	Memberikan pengarahan kepada kelurahan dan masyarakat agar lebih kepada usulan yang menjadi prioritas pada OPD pengampu
----	------------------------------	---	--------	--------	--------	---	---

### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	82,40%	83,50%	101,33%				
2	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	87.5%	100%	100%	Rp 1.185.155.120,00	Rp 1.145.506.220,00	96.65%	96.65%
		Presentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%	100%	Rp 315.546.320,00	Rp 335.156.169,00	87.20%	87.20%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	100%	87.50%	87.50%				
4	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	Rp 1.464.386.880,00	Rp 1.300.752.415,00	88,25%	

		Persentase usulan musrenbangcam yang disampaikan dalam forum PD	78,50%	77,78%	99,08%	Rp 39.576.380,00	Rp 37.958.130,00	95,81%	
--	--	---	--------	--------	--------	------------------	------------------	--------	--

### 3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
1	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	114,29%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	114,29%	Menunjang	Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya sistem yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan pada semua kelurahan di Kecamatan Gadingrejo

		Presentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu	100%	Menunjang	Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara unsur 3 pilar di Kecamatan, 3 pilar ditingkat kelurahan dan tokoh masyarakat setempat dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat
2	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	70%	Menunjang	Ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan karena ada beberapa lembaga yang sudah dibina oleh instansi yang membidangi, sedangkan pada target indikator dicantumkan semua lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Gadingrejo
		Persentase usulan musrenbangcam yang disampaikan dalam forum PD	77,78%	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot	77,78%	Menunjang	Ketercapaian indikator ini didukung oleh suksesnya pelaksanaan musrenbang di kelurahan sehingga usulan dapat masuk ke musrenbang kecamatan tepat waktu



Uraian Penjelasan Tabel:

Pelaksanaan Program *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum* diukur dengan satu indikator yaitu :

1. Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 7 kelurahan dan terealisasi 8 kelurahan sehingga capaiannya sebesar 114,29%. Capaian ini berdasarkan data kelurahan yang telah menggunakan sistem untuk melakukan pelayanan. Ketercapaian indikator ini didukung oleh adanya sistem yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan pada semua kelurahan di Kecamatan Gadingrejo.

Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diukur dengan satu indikator yaitu :

1. Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada data pengaduan masyarakat yang diterima sebanyak 26 pengaduan dan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu sebanyak 26 pengaduan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara unsur 3 pilar di Kecamatan, 3 pilar ditingkat kelurahan dan tokoh masyarakat setempat dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diukur dengan *satu* indikator yaitu :

1. Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 70% sehingga capaiannya sebesar sehingga capaiannya sebesar 70%. Capaian ini berdasarkan dari data kelembagaan masyarakat yang dibina sebesar 16 lembaga

dari total keseluruhan Lembaga yang berjumlah 28 lembaga. Ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan karena ada beberapa lembaga yang sudah dibina oleh instansi yang membidangi, sedangkan pada target indikator dicantumkan semua lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Gadingrejo.

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diukur dengan *satu* indikator yaitu :

1. Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 72% dan terealisasi 77,78% sehingga capaiannya sebesar 108,02%. Capaian ini berdasarkan data usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot sebanyak 63 usulan dari total 81 usulan musrenbang. Ketercapaian indikator ini didukung oleh suksesnya pelaksanaan musrenbang di kelurahan sehingga usulan dapat masuk ke musrenbang kecamatan tepat waktu.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023 per Sasaran Pembangunan dapat dirinci sebagai

berikut:

**Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	12.046.355.589,00	10.997.574.342,00	91,29%
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.185.155.120,00	1.145.506.220,00	96,65%
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	384.374.320,00	335.156.169,00	87,20%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.464.386.880,00	1.300.752.415,00	88,83%
5	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	39.576.380,00	37.958.130,00	95,91%

Dari tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 12.046.355.589,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.997.574.342,00. Sehingga persentase capaian anggarannya adalah 91,29%.
2. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.185.155.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.145.506.220,00. Sehingga persentase capaian anggarannya adalah 96,65%.
3. Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 384.374.320,00 dan terealisasi sebesar Rp. 335.156.169,00. Sehingga persentase capaian anggarannya adalah 87,20%.
4. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.464.386.880,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.300.752.415,00. Sehingga persentase capaian anggarannya adalah 88,83%.

5. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 39.576.380,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.958.130,00. Sehingga persentase capaian anggarannya adalah 95,91%.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
Penilaian Capaian Sasaran Kecamatan Gadingrejo  
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian sampai tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	82,40%	83,50%	101,33%
2	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	1. Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	87.5%	100%	100%

		2. Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	100%	87.50%	87.50%
4	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100%	70%	70%
		2. Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD	78.50%	77.78%	99.08%
5	Meningkatnya tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP SKPD	BB	-	-
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%	100%
<b>Rata-rata</b>			<b>82,21%</b>		

Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa kinerja pada Kecamatan Gadingrejo masuk dalam kategori **Tinggi** karena dapat mencapai nilai rata-rata sebesar 82,21%. Kinerja ini merupakan hasil dari seluruh unsur di Kecamatan Gadingrejo selama tahun 2023. Untuk kedepannya kami akan tetap meningkatkan kualitas kinerja agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik lagi dengan cara meningkatkan sarana dan prasana penunjang pelayanan dimana membuat masyarakat nyaman terhadap pelayanan kami sebagai pelayana masyarakat

tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa sarana dan prasarana adalah hal yang penting bagi peningkatan pelayanan seiring berkembangnya kehidupan bermasyarakat kita juga perlu mengetahui dan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat agar selalu dapat memberikan pelayan yang diinginkan oleh masyarakat, serta selalu meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kami, kapasitas sumber daya aparatur juga perlu untuk selalu ter *update* dengan perkembangan informasi

teknologi agar dapat menyesuaikan dengan jenis-jenis maupun pola-pola pelayanan yang *up to date*.

Pasuruan, 21 Februari 2024

